NARASI SISTEM KETATANEGARAAN RI PASCA-AMANDEMEN UUD 1945 DALAM BUKU TEKS SEJARAH SMA KURIKULUM MERDEKA: ANALISIS KONTEN

Lianda Dewi Sartika[1], Nurlatifa[2]

[1, 2]Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Mataram
Email: liandadewi@staff.unram.ac.id , nurlatifa@staff.unram.ac.id

Abstrak

Narasi sistem ketatanegaraan dalam buku teks sejarah memiliki peran strategis dalam membentuk pemahaman kewarganegaraan peserta didik. Namun, penyajiannya kerap bersifat deskriptif dan kurang memberikan ruang analisis kritis terhadap dinamika konstitusional. Artikel ini menganalisis narasi sistem ketatanegaraan Republik Indonesia pasca-amandemen UUD 1945 dalam buku teks Sejarah SMA Kurikulum Merdeka. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis konten terhadap buku teks Sejarah kelas XI dan XII terbitan Kemendikbudristek. Unit analisis mencakup teks naratif, ilustrasi, dan instrumen asesmen yang berkaitan dengan perkembangan sistem pemerintahan dan transformasi ketatanegaraan era reformasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa narasi disajikan secara kronologis dengan penekanan pada peristiwa politik, namun minim analisis substantif terhadap perubahan konstitusi. Selain itu, terdapat kecenderungan representasi yang bersifat state-centered dan kurang menghadirkan perspektif kritis terhadap relasi kekuasaan. Temuan ini menunjukkan bahwa buku teks belum sepenuhnya mendukung pengembangan pemahaman ketatanegaraan yang kritis dan reflektif dalam pembelajaran sejarah.

Kata Kunci: analisis konten, buku teks sejarah, ketatanegaraan, Kurikulum Merdeka, amandemen UUD 1945.

Abstrak

Narratives of constitutional systems in history textbooks play a strategic role in shaping students' civic understanding. However, their presentation is often descriptive and leaves little room for critical analysis of constitutional dynamics. This article examines the narrative of Indonesia's constitutional system after the amendments to the 1945 Constitution as presented in senior high school history textbooks under the Merdeka Curriculum. This study employs a qualitative approach using content analysis of Grade XI and XII history textbooks published by the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology. The units of analysis include narrative texts, illustrations, and assessment instruments related to the development of governmental systems and constitutional transformations in the reform era. The findings indicate that the narratives are presented chronologically with an emphasis on political events, yet lack substantive analysis of constitutional changes. In addition, there is a tendency toward state-centered representations with limited critical perspectives on power relations. These findings suggest that the textbooks have not fully supported the development of critical and reflective constitutional understanding in history learning.

Keyword: content analysis, history textbooks, constitutional system, Merdeka Curriculum, amendments to the 1945 Constitution.

©Pendidikan Sejarah FKIP UM Palembang
DOI: https://doi.org/10.32502/jdh.v6i1.11058

PENDAHULUAN

Pendidikan sejarah memiliki peran strategis dalam membentuk pemahaman warga negara tentang sistem ketatanegaraan bangsanya. Dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan, sejarah tidak hanya berfungsi sebagai rekonstruksi peristiwa masa lalu, tetapi juga sebagai medium untuk menanamkan kesadaran historis dan kemampuan berpikir kritis terhadap dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pendidikan sejarah harus mampu memperkuat karakter dan identitas kebangsaan melalui pemahaman yang reflektif terhadap pengalaman historis bangsa (A. Hasan, 2017). Dalam konteks Indonesia, pembelajaran sejarah memiliki dimensi yang lebih kompleks karena berkaitan erat dengan pembentukan kesadaran konstitusional dan pemahaman terhadap sistem ketatanegaraan yang terus mengalami perubahan. Oleh karena itu, pendidikan sejarah tidak dapat dipisahkan dari upaya membangun warga negara yang memiliki literasi konstitusional serta kemampuan untuk memahami relasi kekuasaan secara kritis.

Di tengah dinamika demokrasi pasca-Reformasi 1998, kebutuhan akan pemahaman yang komprehensif terhadap transformasi sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menjadi semakin mendesak. Reformasi tidak hanya menandai perubahan politik, tetapi juga membawa implikasi mendasar terhadap struktur ketatanegaraan melalui amandemen UUD 1945 yang mengubah distribusi kekuasaan, memperkuat prinsip *checks and balances*, serta mereposisi lembaga negara dalam sistem demokrasi (Asshiddiqie, 2020). Perubahan tersebut menuntut generasi muda untuk tidak hanya mengetahui fakta sejarah, tetapi juga memahami substansi perubahan konstitusional secara analitis. Namun, berbagai kajian menunjukkan bahwa pemahaman terhadap dinamika ketatanegaraan seringkali direduksi menjadi narasi faktual tanpa analisis kritis terhadap proses dan implikasinya (Saputra et al., 2021) (Pratiwi & Sayono, 2024). Kondisi ini berpotensi menghasilkan pemahaman yang parsial dan normatif terhadap sistem ketatanegaraan, yang pada akhirnya melemahkan kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam konteks kehidupan demokratis.

Dalam konteks pembelajaran di sekolah, buku teks sejarah memiliki posisi yang sangat sentral sebagai sumber utama dalam proses konstruksi pengetahuan siswa. Buku teks tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga sebagai instrumen ideologis yang merepresentasikan perspektif tertentu terhadap sejarah (Apple, 2019). Dengan demikian, narasi yang disajikan dalam buku teks memiliki implikasi langsung terhadap cara siswa memahami realitas historis dan ketatanegaraan. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa buku teks sejarah di Indonesia cenderung merepresentasikan narasi yang bersifat kronologis, berorientasi pada peristiwa, serta sering kali mengandung bias ideologis tertentu sesuai dengan konteks rezim atau kebijakan pendidikan yang berlaku (Mahardika, 2020). Selain itu, pola narasi dalam buku teks juga menunjukkan kecenderungan heroistik dan faktual, dengan keterbatasan dalam menghadirkan perspektif reflektif dan kritis (Susanto et al., 2022; Susanto & Purwanta, 2022). Temuan ini mengindikasikan bahwa buku teks sejarah belum sepenuhnya berfungsi sebagai sarana pengembangan kemampuan berpikir historis yang kritis.

Seiring dengan implementasi Kurikulum Merdeka, terdapat tuntutan baru dalam pembelajaran sejarah yang menekankan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, reflektif, dan multiperspektif. Kurikulum ini memberikan ruang yang lebih luas bagi peserta didik untuk memahami sejarah secara kontekstual dan analitis, sebagaimana tertuang dalam capaian pembelajaran yang menekankan pada kemampuan mengevaluasi peristiwa sejarah dari berbagai sudut pandang (Safitry et al., 2021, 2022). Namun demikian,

beberapa penelitian mutakhir menunjukkan bahwa meskipun terjadi pembaruan kurikulum, buku teks sebagai implementasi konkret di lapangan belum sepenuhnya merefleksikan perubahan paradigma tersebut(Pratiwi & Sayono, 2024). Hal ini menimbulkan kesenjangan antara idealitas kurikulum dan praktik pembelajaran yang sesungguhnya. Dalam konteks inilah, analisis terhadap narasi sistem ketatanegaraan dalam buku teks sejarah menjadi penting untuk mengidentifikasi bagaimana perubahan konstitusional pasca-amandemen UUD 1945 direpresentasikan, serta sejauh mana narasi tersebut mendukung pengembangan pemahaman ketatanegaraan yang kritis dalam pembelajaran sejarah.

Hadirnya Kurikulum Merdeka melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 menandai perubahan paradigma dalam pembelajaran sejarah di Indonesia. Kurikulum ini tidak lagi menempatkan sejarah sebagai sekadar transmisi pengetahuan faktual, melainkan sebagai sarana pengembangan kemampuan berpikir kritis, reflektif, dan kontekstual. Dalam kerangka ini, pendekatan pembelajaran sejarah diarahkan pada integrasi antara kronologi peristiwa dan analisis tematik yang memungkinkan peserta didik memahami keterkaitan antara masa lalu dan realitas kontemporer. Selain itu, Kurikulum Merdeka menekankan pentingnya *Higher Order Thinking Skills* (HOTS), penggunaan sumber sejarah yang beragam, serta pengembangan kemampuan interpretasi terhadap berbagai perspektif historis (Capaian Pembelajaran pada Kurikulum Merdeka, 2024). Dengan demikian, pembelajaran sejarah tidak hanya berorientasi pada "apa yang terjadi", tetapi juga "mengapa dan bagaimana peristiwa tersebut dimaknai dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara".

Secara lebih spesifik, dalam Capaian Pembelajaran (CP) Sejarah Fase F, peserta didik diharapkan mampu mengevaluasi secara kritis dinamika kehidupan bangsa Indonesia, termasuk perkembangan sistem ketatanegaraan dari masa ke masa. Kompetensi ini mencakup kemampuan untuk menganalisis perubahan struktur kekuasaan, memahami proses pembentukan konstitusi, serta merefleksikan implikasi historisnya terhadap kehidupan demokrasi saat ini. Dengan kata lain, tema ketatanegaraan tidak lagi diposisikan sebagai bagian periferal dalam pembelajaran sejarah, melainkan sebagai inti dari pembentukan kesadaran kewarganegaraan yang kritis. Hal ini menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka secara normatif telah mengakomodasi kebutuhan untuk mengembangkan *constitutional literacy* dan *historical reasoning* peserta didik secara lebih mendalam.

Sebagai implementasi konkret dari kebijakan tersebut, buku teks Sejarah SMA kelas XI dan XII yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek pada tahun 2021 dan 2022 menjadi instrumen utama dalam menerjemahkan visi kurikulum ke dalam praktik pembelajaran di kelas. Buku teks ini dirancang tidak hanya sebagai sumber informasi, tetapi juga sebagai perangkat pedagogis yang memfasilitasi aktivitas berpikir kritis melalui penyajian narasi, ilustrasi, serta pertanyaan-pertanyaan reflektif. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa buku teks dalam Kurikulum Merdeka telah mengalami perubahan dalam hal struktur penyajian, dengan mengintegrasikan pendekatan tematik, aktivitas berbasis inkuiri, dan penekanan pada keterampilan abad ke-21 (Pratiwi & Sayono, 2024). Namun demikian, sebagai produk kebijakan pendidikan, buku teks tetap tidak dapat dilepaskan dari potensi bias dalam konstruksi narasi, baik yang bersifat ideologis maupun epistemologis (Apple, 2019; Mahardika, 2020).

Dalam konteks tersebut, muncul pertanyaan krusial mengenai narasi sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, khususnya pasca amandemen UUD 1945 direpresentasikan dalam buku teks sejarah Kurikulum Merdeka. Mengingat bahwa periode reformasi merupakan fase penting dalam transformasi konstitusional Indonesia, representasi narasi pada tema ini

memiliki implikasi signifikan terhadap pemahaman siswa tentang demokrasi, distribusi kekuasaan, dan relasi antara negara dan warga negara. Namun, hingga saat ini, kajian yang secara khusus menganalisis representasi ketatanegaraan dalam buku teks sejarah Kurikulum Merdeka masih sangat terbatas. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek karakter, identitas nasional, atau pola narasi umum, tanpa mengkaji secara mendalam dimensi ketatanegaraan sebagai bagian dari konstruksi pengetahuan sejarah. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang sistematis untuk mengidentifikasi konstruksi narasi ketatanegaraan, serta sejauh mana narasi tersebut selaras dengan tuntutan pembelajaran sejarah yang kritis dan reflektif dalam Kurikulum Merdeka.

Kajian terhadap buku teks sejarah di Indonesia telah dilakukan oleh sejumlah peneliti dengan fokus yang beragam, terutama terkait konstruksi narasi dan muatan ideologis di dalamnya. Penelitian Susanto & Purwanta (2022) menunjukkan bahwa buku teks sejarah tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga membentuk wacana identitas nasional melalui seleksi dan penekanan peristiwa tertentu. Studi lanjutan oleh Nindiati (2023) mengungkap adanya kecenderungan dominasi narasi militerisme dalam buku teks sejarah masa Orde Baru yang merefleksikan kepentingan politik rezim dan materi sejarah yang sensitif, seperti peristiwa G30S, masih direpresentasikan secara kurang kritis dan cenderung mempertahankan narasi dominan. Dalam konteks yang lebih mutakhir, Susanto et al. (2022) menemukan bahwa pola narasi buku teks sejarah di Indonesia cenderung bersifat kronologis dan berpusat pada peristiwa, dengan keterbatasan dalam menghadirkan analisis reflektif. Kajian terbaru oleh Pratiwi & Sayono (2024) yang menganalisis buku teks sejarah Kurikulum Merdeka juga menunjukkan bahwa meskipun terdapat penguatan nilai karakter, dimensi analisis kritis dalam narasi masih belum optimal.

Meskipun berbagai penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami konstruksi narasi buku teks sejarah, sebagian besar masih berfokus pada aspek identitas nasional, ideologi rezim, nilai karakter, atau pola narasi umum. Hingga saat ini, belum terdapat kajian yang secara spesifik mengkaji perihal sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, terutama pasca amandemen UUD 1945 direpresentasikan dalam buku teks sejarah Kurikulum Merdeka. Padahal, periode reformasi merupakan fase krusial dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia yang ditandai dengan perubahan mendasar dalam struktur kekuasaan dan prinsip demokrasi. Di sisi lain, kajian mengenai ketatanegaraan pasca-amandemen UUD 1945 lebih banyak dilakukan dalam perspektif yuridis-normatif yang menitikberatkan pada analisis hukum tata negara dan kelembagaan Pratiwi et al, (2024), sehingga kurang memperhatikan pengetahuan tersebut ditransmisikan dalam konteks pendidikan sejarah. Keterbatasan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kajian substantif ketatanegaraan dan kajian pedagogis dalam pendidikan sejarah. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara sistematis representasi narasi sistem ketatanegaraan RI pasca-amandemen UUD 1945 dalam buku teks sejarah SMA Kurikulum Merdeka dari perspektif pendidikan sejarah.

Berdasarkan uraian latar belakang dan kesenjangan penelitian yang telah dipaparkan, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara sistematis representasi narasi sistem ketatanegaraan Republik Indonesia pasca amandemen UUD 1945 dalam buku teks Sejarah SMA Kurikulum Merdeka kelas XI dan XII. Secara lebih spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi dan menganalisis muatan narasi ketatanegaraan yang disajikan dalam buku teks, khususnya terkait dinamika sistem pemerintahan dan transformasi konstitusional pada era reformasi; (2) mengevaluasi kelengkapan, keberimbangan, serta orientasi narasi yang dibangun,

termasuk kecenderungan ideologis yang mungkin terkandung di dalamnya; dan (3) merumuskan rekomendasi pengembangan narasi ketatanegaraan dalam buku teks sejarah yang lebih analitis, kritis, dan kontekstual sesuai dengan tuntutan pembelajaran sejarah dalam Kurikulum Merdeka.

Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan pendidikan sejarah di Indonesia. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian kritis terhadap buku teks sejarah dengan menghadirkan fokus analisis pada dimensi ketatanegaraan yang selama ini relatif kurang mendapat perhatian dalam literatur pendidikan sejarah. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pengembang kurikulum, penulis buku teks, dan pendidik dalam merancang materi pembelajaran sejarah yang lebih reflektif dan mampu mendorong kemampuan berpikir kritis peserta didik. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi dalam penguatan literasi konstitusional siswa SMA sebagai bagian dari upaya membentuk warga negara yang memiliki pemahaman yang utuh dan kritis terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia di era demokrasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain analisis konten (*content analysis*). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasi muatan teks secara sistematis guna memahami representasi narasi dalam dokumen tertulis. Analisis konten relevan digunakan dalam kajian buku teks karena mampu mengungkap makna, pola, serta kecenderungan ideologis yang terkandung dalam teks secara objektif dan terstruktur (Krippendorff, 2019; Neuendorf, 2019). Penelitian ini berfokus pada analisis dokumen buku teks sejarah yang digunakan dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Sumber data penelitian ini berupa dokumen primer, yaitu dua buku teks resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Buku pertama adalah *Sejarah untuk SMA/SMK Kelas XI* (Safitry et al., 2021) yang memuat materi kolonialisme, pergerakan kebangsaan, masa pendudukan Jepang, hingga perumusan UUD 1945. Buku kedua adalah *Sejarah untuk SMA/MA Kelas XII* (Safitry et al., 2022) yang mencakup dinamika ketatanegaraan sejak awal kemerdekaan, periode demokrasi liberal dan terpimpin, Orde Baru, hingga era Reformasi, termasuk amandemen UUD 1945. Kedua buku ini dipilih karena merupakan buku teks utama dalam Kurikulum Merdeka dan menjadi rujukan pembelajaran sejarah di tingkat SMA.

Unit analisis dalam penelitian ini mencakup seluruh komponen yang berkaitan dengan tema ketatanegaraan. Komponen tersebut meliputi: (1) teks naratif utama yang membahas sistem pemerintahan, lembaga negara, dan konstitusi; (2) ilustrasi berupa gambar, foto, dan infografis yang merepresentasikan aspek ketatanegaraan; (3) pertanyaan kunci, aktivitas pembelajaran, dan asesmen yang mengarahkan pemahaman siswa terhadap isu ketatanegaraan; serta (4) glosarium yang memuat istilah-istilah terkait konsep ketatanegaraan. Penetapan unit analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai narasi ketatanegaraan yang dikonstruksi dalam buku teks.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan metode pembacaan intensif (*close reading*) terhadap seluruh isi buku teks. Proses analisis data dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, reduksi data, yaitu mengidentifikasi dan menyeleksi bagian-bagian teks yang relevan dengan tema ketatanegaraan. Kedua, kategorisasi yaitu mengelompokkan data ke dalam dimensi analisis yang meliputi kelengkapan materi, keberimbangan perspektif, dan orientasi narasi. Ketiga, interpretasi, yaitu menafsirkan temuan untuk mengungkap kecenderungan narasi, baik yang bersifat kritis, deskriptif, maupun ideologis, serta relevansinya dengan perkembangan sistem

ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen UUD 1945.

Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi sumber dengan membandingkan temuan antarbab dan antarbuku teks, serta melalui *peer debriefing* untuk meminimalkan subjektivitas peneliti dalam proses interpretasi. Dengan prosedur ini, hasil analisis diharapkan memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang memadai dalam menjelaskan representasi narasi ketatanegaraan dalam buku teks sejarah Kurikulum Merdeka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Narasi Pembentukan Negara dan Lembaga (1945) dalam Buku Teks

Temuan pertama menunjukkan bahwa buku teks *Sejarah SMA Kelas XII* memberikan ruang yang relatif memadai dalam menggambarkan proses awal pembentukan negara dan lembaga ketatanegaraan pasca-Proklamasi 1945. Narasi mengenai sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945 disajikan secara kronologis sebagai peristiwa kunci dalam pembentukan negara, yang menghasilkan tiga keputusan fundamental, yaitu pengesahan UUD 1945, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta pembentukan Komite Nasional. Penyajian ini tercermin dalam struktur materi pada Bab 1 yang secara sistematis menguraikan fase awal pembentukan pemerintahan Republik Indonesia . Pendekatan kronologis ini sejalan dengan karakter umum buku teks sejarah yang menekankan urutan peristiwa sebagai kerangka utama pemahaman historis.

Namun demikian, analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa narasi tersebut cenderung berhenti pada level deskriptif-faktual dan belum mengembangkan dimensi analitis yang memadai. Misalnya, pengesahan UUD 1945 hanya diposisikan sebagai "hasil keputusan" tanpa elaborasi mengenai makna yuridis dan konsekuensi konstitusionalnya, seperti perubahan dari negara kolonial menuju negara hukum yang berdaulat atau implikasi prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan. Dalam perspektif historiografi pendidikan, kondisi ini menunjukkan keterbatasan dalam mengembangkan *historical reasoning* peserta didik, karena siswa tidak diajak untuk memahami hubungan kausalitas, signifikansi, maupun interpretasi terhadap peristiwa sejarah (Levstik & Barton, 2023). S. H. Hasan (2012) juga menegaskan bahwa pembelajaran sejarah seharusnya tidak berhenti pada penguasaan fakta, tetapi harus mendorong kemampuan reflektif terhadap makna peristiwa dalam kehidupan berbangsa.

Temuan ini mengindikasikan adanya kecenderungan reduksi kompleksitas ketatanegaraan menjadi sekadar rangkaian peristiwa politik. Padahal, pembentukan lembaga negara pada awal kemerdekaan merupakan proses fundamental yang menentukan arah sistem ketatanegaraan Indonesia di masa selanjutnya. Ketiadaan analisis terhadap prinsip-prinsip dasar konstitusi, seperti pembagian kekuasaan, legitimasi politik, dan hubungan antara lembaga negara, berpotensi menghasilkan pemahaman yang dangkal dan normatif di kalangan peserta didik. Dalam kerangka *critical pedagogy*, hal ini menunjukkan bahwa buku teks belum sepenuhnya berfungsi sebagai alat untuk mengembangkan kesadaran kritis terhadap struktur kekuasaan (Freire et al., 2018).

Di sisi lain, narasi mengenai Maklumat Pemerintah 14 November 1945 yang mengubah sistem kabinet presidensial menjadi parlementer disajikan dengan pendekatan yang relatif lebih kontekstual. Buku teks tidak hanya menyebutkan perubahan sistem pemerintahan, tetapi juga menjelaskan latar belakang politik dan diplomatik dari kebijakan tersebut, yaitu upaya pemerintah Republik Indonesia untuk memperoleh pengakuan internasional dan meyakinkan dunia bahwa Indonesia bukan negara fasis bentukan Jepang . Penyajian ini menunjukkan adanya upaya untuk mengaitkan peristiwa domestik dengan konteks global, yang merupakan salah satu indikator penting dalam pembelajaran sejarah yang bermakna.

Meskipun demikian, narasi tersebut masih memiliki keterbatasan dalam mengembangkan analisis kritis terhadap konsekuensi jangka panjang dari perubahan sistem pemerintahan tersebut. Buku teks tidak secara eksplisit membahas implikasi perubahan dari sistem presidensial ke parlementer terhadap stabilitas politik, inkonsistensi dengan UUD 1945, maupun dampaknya terhadap praktik demokrasi di Indonesia pada periode awal kemerdekaan. Dengan demikian, meskipun terdapat upaya kontekstualisasi, narasi yang disajikan belum sepenuhnya mengakomodasi sudut pandang multiperspektif dan analisis kritis yang diperlukan dalam pembelajaran sejarah berbasis Kurikulum Merdeka.

Secara keseluruhan, temuan pada bagian ini menunjukkan bahwa buku teks sejarah telah berhasil menyajikan kerangka dasar pembentukan sistem ketatanegaraan secara kronologis dan relatif sistematis. Namun, keterbatasan dalam aspek analisis substantif dan refleksi kritis menunjukkan bahwa narasi yang dibangun masih berada pada level *lower-order historical thinking*. Untuk mencapai tujuan pembelajaran sejarah yang menekankan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan reflektif, diperlukan pengayaan narasi yang tidak hanya menjelaskan "apa yang terjadi", tetapi juga "mengapa dan bagaimana makna peristiwa tersebut dalam konteks ketatanegaraan Indonesia".

Dinamika Ketatanegaraan 1950—1998: Kekosongan Narasi Kritis

Temuan kedua dan paling signifikan dalam penelitian ini adalah minimnya narasi kritis terhadap dinamika ketatanegaraan Indonesia pada periode 1950-1998. Buku teks *Sejarah SMA Kelas XII* membahas periode Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin dalam Bab 2 serta Orde Baru dalam Bab 3 secara cukup luas, namun fokus pembahasan lebih diarahkan pada dinamika politik, konflik ideologi, serta perkembangan sosial ekonomi. Hal ini terlihat dari struktur materi yang menekankan pada konteks Perang Dingin, polarisasi kekuatan politik, serta gejolak sosial sebagai dampak perubahan rezim . Meskipun aspek-aspek tersebut penting, pendekatan ini cenderung mengesampingkan analisis terhadap perubahan struktur ketatanegaraan dan prinsip-prinsip konstitusional yang mendasarinya.

Secara lebih spesifik, pembahasan mengenai sistem pemerintahan parlementer pada masa Demokrasi Liberal dan pergeseran menuju Demokrasi Terpimpin tidak disertai dengan analisis mendalam mengenai implikasi konstitusionalnya. Narasi buku teks lebih banyak menggambarkan ketidakstabilan kabinet, konflik antarpartai, serta munculnya konsep Nasakom sebagai strategi politik Presiden Sukarno, tanpa mengaitkannya secara eksplisit dengan perubahan prinsip pembagian kekuasaan atau pergeseran dari sistem demokrasi konstitusional menuju sistem kekuasaan yang lebih terpusat. Demikian pula pada pembahasan Orde Baru, penekanan diberikan pada stabilitas politik dan pembangunan ekonomi, sementara proses konsolidasi kekuasaan negara, termasuk dominasi lembaga eksekutif dan posisi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara, tidak dianalisis secara kritis dalam kerangka *checks and balances*.

Keterbatasan ini menunjukkan adanya kecenderungan *absent narrative*, yaitu hilangnya atau tidak dihadirkannya aspek-aspek tertentu dalam narasi sejarah yang justru memiliki signifikansi tinggi dalam memahami sistem ketatanegaraan. Dalam perspektif analisis buku teks, Pingel (2010) menegaskan bahwa buku teks tidak hanya menyajikan apa yang ditampilkan (*what is included*), tetapi juga apa yang dihilangkan (*what is excluded*), yang keduanya sama-sama mencerminkan konstruksi ideologis. Dengan demikian, ketiadaan pembahasan mengenai distorsi konstitusi, penyimpangan terhadap prinsip negara hukum, serta lemahnya mekanisme kontrol terhadap kekuasaan pada periode 1950-1998 menunjukkan adanya penyederhanaan realitas historis yang berpotensi mengaburkan pemahaman siswa terhadap dinamika ketatanegaraan yang sebenarnya.

Analisis ini juga sejalan dengan pandangan Apple (2019) yang menyatakan bahwa buku teks merupakan produk ideologis yang merepresentasikan kepentingan tertentu melalui seleksi dan penekanan narasi. Dalam konteks buku teks sejarah Kurikulum Merdeka, narasi yang disajikan cenderung bersifat *state-centered*, dengan menempatkan negara sebagai aktor utama yang relatif stabil dan rasional, sementara dinamika kekuasaan yang problematis tidak diungkap secara eksplisit. Akibatnya, peserta didik tidak memperoleh gambaran yang utuh mengenai bagaimana kekuasaan negara dapat mengalami deviasi dari prinsip konstitusional, serta bagaimana mekanisme koreksi terhadap deviasi tersebut berkembang dalam sejarah Indonesia.

Lebih jauh, minimnya narasi kritis terhadap periode ini berimplikasi langsung terhadap kualitas pembelajaran sejarah. Tanpa adanya analisis terhadap aspek ketatanegaraan, peserta didik berpotensi memahami sejarah hanya sebagai rangkaian pergantian rezim dan peristiwa politik, tanpa mampu mengidentifikasi pola perubahan sistem kekuasaan dan implikasinya terhadap kehidupan demokrasi. Dalam kerangka *historical thinking*, kondisi ini menunjukkan bahwa pembelajaran belum mencapai level analisis dan evaluasi, melainkan masih berada pada tahap deskriptif (Seixas & Morton, 2013). Padahal, Kurikulum Merdeka secara eksplisit menuntut pengembangan kemampuan berpikir kritis dan reflektif terhadap dinamika sejarah.

Dengan demikian, temuan ini menegaskan bahwa meskipun buku teks telah menyajikan materi secara luas dan sistematis, terdapat kekosongan signifikan dalam narasi ketatanegaraan yang bersifat kritis. Kekosongan ini tidak hanya menunjukkan keterbatasan dalam konstruksi pengetahuan sejarah, tetapi juga berpotensi menghambat pengembangan literasi konstitusional peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi narasi dalam buku teks sejarah yang tidak hanya menampilkan fakta dan peristiwa, tetapi juga mengintegrasikan analisis terhadap struktur kekuasaan, prinsip konstitusional, dan dinamika relasi negara dengan warga negara secara lebih komprehensif.

Representasi Transformasi Ketatanegaraan Era Reformasi

Bab 4 buku teks *Sejarah SMA Kelas XII* yang membahas era reformasi (1998–sekarang) merupakan bagian yang paling relevan dengan fokus penelitian ini. Reformasi dalam buku teks dimaknai sebagai "perubahan dalam sistem politik (demokrasi) yang terjadi melalui mekanisme lembaga pemerintahan yang ada" (Safitry et al., 2022). Definisi ini menunjukkan adanya upaya konseptualisasi reformasi sebagai proses institusional, bukan sekadar pergantian rezim. Namun demikian, ketika ditelusuri lebih lanjut, pembahasan mengenai inti transformasi ketatanegaraan, yakni amandemen UUD 1945, tidak dikembangkan secara substantif. Amandemen lebih banyak hadir sebagai konteks kebijakan atau tersirat dalam bagian asesmen, tanpa penjelasan sistematis mengenai perubahan struktur kekuasaan yang dihasilkannya. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pengenalan konsep dan pendalaman analisis dalam narasi buku teks.

Secara konseptual, empat tahap amandemen UUD 1945 (1999, 2000, 2001, dan 2002) merupakan titik balik paling fundamental dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Amandemen tersebut mengubah arsitektur kekuasaan negara secara signifikan, antara lain melalui penghapusan supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), penguatan prinsip *checks and balances*, pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi, penguatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta penerapan mekanisme pemilihan umum secara langsung. Namun, dalam buku teks, transformasi tersebut tidak disajikan sebagai satu kesatuan narasi yang utuh dan terstruktur. Untuk memperjelas kesenjangan ini, berikut disajikan perbandingan antara materi ideal yang seharusnya hadir dengan representasi dalam buku teks:

Tabel 1. Perbandingan antara materi ideal dengan representasi dalam buku teks

Aspek Ketatanegaraan	Idealnya dalam Buku Teks	Representasi dalam Buku Teks
Amandemen UUD 1945 (1999-2002)	Penjelasan kronologis dan substansi tiap amandemen	Tidak dijelaskan secara sistematis
Perubahan kedudukan MPR	Analisis pergeseran dari lembaga tertinggi ke lembaga setara	Tidak dibahas
Sistem presidensial	Penegasan penguatan sistem presidensial pasca-amandemen	Tidak dijelaskan eksplisit
Pemilu langsung	Dijelaskan sebagai perubahan fundamental demokrasi	Disebut secara umum
Mahkamah Konstitusi	Fungsi dan peran dalam sistem *checks and balances*	Tidak dibahas
DPD	Peran dalam sistem bikameral	Minim pembahasan

Tabel tersebut menunjukkan adanya *gap naratif* yang signifikan antara kompleksitas perubahan ketatanegaraan dengan representasi dalam buku teks. Dalam perspektif analisis buku teks, kondisi ini dapat dikategorikan sebagai bentuk *selective tradition* (Apple, 2019), yaitu proses seleksi pengetahuan di mana hanya aspek tertentu yang dianggap penting untuk disampaikan, sementara aspek lain yang krusial justru dihilangkan. Selain itu, Pingel (2010) menyebut fenomena ini sebagai *curricular silence*, yakni absennya tema-tema penting dalam buku teks yang dapat memengaruhi cara peserta didik memahami realitas historis.

Terdapat beberapa kemungkinan penyebab munculnya kesenjangan tersebut. Pertama, keterbatasan ruang dalam buku teks yang mendorong penulis untuk melakukan simplifikasi materi, sehingga aspek ketatanegaraan yang kompleks tidak dijelaskan secara mendalam. Kedua, orientasi kurikulum yang masih cenderung menempatkan sejarah sebagai narasi peristiwa, bukan sebagai analisis struktural terhadap sistem kekuasaan. Ketiga, adanya pertimbangan pedagogis untuk menghindari kompleksitas konsep hukum tata negara yang dianggap sulit bagi siswa SMA. Namun, justifikasi tersebut tidak sepenuhnya dapat diterima, mengingat Kurikulum Merdeka justru menekankan pengembangan kemampuan berpikir kritis dan analitis, termasuk dalam memahami dinamika konstitusional.

Implikasi dari kekosongan narasi ini sangat signifikan terhadap pembelajaran sejarah. Tanpa pemahaman yang memadai mengenai hasil amandemen UUD 1945, peserta didik berpotensi mengalami *conceptual gap* dalam memahami sistem ketatanegaraan yang berlaku saat ini. Mereka mungkin mengetahui bahwa Indonesia telah mengalami reformasi, tetapi tidak memahami bagaimana reformasi tersebut mengubah struktur kekuasaan negara secara fundamental. Dalam perspektif *historical literacy*, kondisi ini menunjukkan bahwa siswa tidak mencapai pemahaman konseptual terhadap perubahan historis, melainkan hanya memahami peristiwa sebagai fakta yang terfragmentasi. Lebih jauh, lemahnya pemahaman ini dapat berdampak pada rendahnya literasi konstitusional dan kemampuan berpikir kritis dalam konteks kehidupan demokrasi.

Dengan demikian, temuan ini menegaskan bahwa representasi

transformasi ketatanegaraan era reformasi dalam buku teks sejarah Kurikulum Merdeka masih belum optimal. Narasi yang disajikan belum mampu menjembatani antara fakta historis dan pemahaman konseptual mengenai sistem ketatanegaraan. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi narasi yang lebih komprehensif dengan menekankan pada analisis perubahan struktur kekuasaan, fungsi lembaga negara, serta implikasinya terhadap kehidupan demokrasi kontemporer. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa pembelajaran sejarah tidak hanya menghasilkan pengetahuan faktual, tetapi juga membentuk warga negara yang memiliki kesadaran konstitusional yang kritis dan reflektif.

Orientasi Narasi: Faktual-Kronologis versus Kritis-Reflektif

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa orientasi narasi ketatanegaraan dalam buku teks Sejarah SMA kelas XI dan XII cenderung bersifat faktual-kronologis. Narasi yang disajikan lebih banyak menjawab pertanyaan dasar seperti *apa yang terjadi* dan *kapan peristiwa berlangsung*, namun belum secara optimal mengembangkan dimensi analitis yang menjawab *mengapa peristiwa tersebut penting* dan *apa implikasinya terhadap kehidupan ketatanegaraan saat ini*. Hal ini tampak dari pola penyajian materi yang menekankan urutan peristiwa sejarah secara linier, sebagaimana secara eksplisit dinyatakan dalam buku bahwa materi disajikan "secara kronologis untuk memudahkan peserta didik mempelajarinya" . Pendekatan ini memang penting sebagai dasar pemahaman sejarah, tetapi menjadi problematis ketika tidak diikuti dengan pengembangan kemampuan interpretatif dan reflektif.

Ketidakseimbangan ini menjadi semakin signifikan jika dibandingkan dengan tuntutan Capaian Pembelajaran (CP) Kurikulum Merdeka Fase F, yang menekankan kemampuan peserta didik untuk "menganalisis peristiwa sejarah secara kritis dan kolaboratif". Dalam kerangka ini, pembelajaran sejarah tidak hanya menuntut penguasaan fakta, tetapi juga kemampuan berpikir tingkat tinggi (*Higher Order Thinking Skills/HOTS*), seperti analisis (C4), evaluasi (C5), dan kreasi (C6). Namun, analisis terhadap komponen asesmen dalam buku teks menunjukkan bahwa sebagian besar pertanyaan masih berada pada level kognitif rendah hingga menengah (C1–C3), yaitu mengingat, memahami, dan menerapkan informasi secara terbatas.

Sebagai contoh, dalam bagian asesmen dan aktivitas pada buku teks, pertanyaan yang muncul umumnya berbentuk: *"Jelaskan latar belakang terjadinya peristiwa X"*, *"Sebutkan hasil sidang PPKI"*, atau *"Apa dampak dari kebijakan pemerintah pada masa tertentu?"*. Pertanyaan-pertanyaan semacam ini lebih menekankan pada kemampuan reproduksi informasi daripada analisis kritis. Meskipun terdapat beberapa upaya untuk menghadirkan aktivitas reflektif, seperti diskusi kelompok atau pertanyaan terbuka, instruksi yang diberikan masih belum secara eksplisit mendorong siswa untuk mengevaluasi kebijakan ketatanegaraan, membandingkan sistem pemerintahan, atau mengaitkan peristiwa historis dengan kondisi demokrasi kontemporer. Dengan demikian, secara operasional, asesmen dalam buku teks belum sepenuhnya mencerminkan tuntutan HOTS yang menjadi ciri utama Kurikulum Merdeka.

Dalam perspektif teori pendidikan sejarah, kondisi ini menunjukkan bahwa pembelajaran masih berada pada level *surface learning*, yaitu pemahaman yang berorientasi pada fakta dan informasi, bukan pada *deep learning* yang menekankan makna, interpretasi, dan refleksi (Seixas & Morton, 2013). Levstik & Barton (2023) menegaskan bahwa kemampuan berpikir historis yang matang mensyaratkan keterlibatan siswa dalam proses analisis sebab-akibat, penilaian terhadap berbagai perspektif, serta refleksi terhadap signifikansi peristiwa. Ketika buku teks tidak menyediakan ruang yang cukup untuk proses tersebut, pembelajaran sejarah berpotensi kehilangan fungsi

transformasionalnya dalam membentuk warga negara yang kritis.

Lebih lanjut, orientasi faktual-kronologis ini juga berdampak pada cara siswa memahami sistem ketatanegaraan. Tanpa adanya dorongan untuk mengevaluasi dan merefleksikan dinamika kekuasaan, peserta didik cenderung menerima narasi sejarah secara pasif dan normatif. Hal ini berimplikasi pada rendahnya kemampuan untuk mengaitkan perubahan historis, seperti amandemen UUD 1945, dengan realitas politik dan konstitusional yang mereka hadapi saat ini. Dengan kata lain, terdapat kesenjangan antara pengetahuan sejarah dan kesadaran kewarganegaraan (*civic awareness*) yang seharusnya menjadi tujuan utama pembelajaran sejarah dalam konteks pendidikan demokrasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidakselarasan antara orientasi narasi buku teks dengan semangat Kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran berbasis HOTS dan refleksi kritis. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan rekonstruksi desain narasi dan asesmen dalam buku teks sejarah yang tidak hanya berorientasi pada penyampaian fakta, tetapi juga pada pengembangan kemampuan analitis, evaluatif, dan reflektif peserta didik. Hal ini penting agar pembelajaran sejarah benar-benar mampu berkontribusi dalam membentuk literasi konstitusional dan kapasitas berpikir kritis generasi muda Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa narasi sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dalam buku teks Sejarah SMA Kurikulum Merdeka kelas XI dan XII masih bersifat parsial dan belum disajikan secara proporsional sesuai dengan tingkat signifikansi historisnya. Pembahasan mengenai pembentukan negara pada tahun 1945 telah disajikan secara relatif memadai melalui narasi kronologis yang sistematis, meskipun masih terbatas pada level deskriptif dan belum mengembangkan analisis konstitusional secara mendalam. Sebaliknya, dinamika ketatanegaraan pada periode 1950-1998 menunjukkan adanya kekosongan narasi kritis, terutama dalam menjelaskan perubahan struktur kekuasaan dan implikasinya terhadap prinsip demokrasi dan *checks and balances*. Temuan paling krusial terletak pada representasi era reformasi. Amandemen UUD 1945 sebagai fondasi utama sistem ketatanegaraan kontemporer tidak dijelaskan secara komprehensif, melainkan hanya hadir secara implisit dan terfragmentasi dalam narasi.

Selain itu, orientasi narasi buku teks yang masih dominan faktual-kronologis menunjukkan ketidaksesuaian dengan tuntutan Kurikulum Merdeka yang menekankan pengembangan kemampuan berpikir kritis dan reflektif. Buku teks lebih banyak memfasilitasi pemahaman pada level penguasaan fakta, tanpa mendorong analisis mendalam terhadap makna dan implikasi peristiwa sejarah dalam konteks kehidupan bernegara. Kondisi ini berimplikasi pada terbatasnya pengembangan literasi konstitusional peserta didik, sehingga pemahaman mereka terhadap sistem ketatanegaraan cenderung bersifat normatif dan kurang kritis.

Implikasi dari temuan ini menegaskan perlunya rekonstruksi narasi ketatanegaraan dalam buku teks sejarah, khususnya pada materi amandemen UUD 1945 dan transformasi struktural pasca reformasi, agar lebih analitis, kontekstual, dan berorientasi pada pengembangan *higher order thinking skills*. Di samping itu, guru sejarah memiliki peran strategis untuk melengkapi keterbatasan buku teks melalui penggunaan sumber belajar alternatif yang mendorong diskusi kritis dan refleksi. Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengkaji bagaimana narasi dalam buku teks ini dipahami dan diinterpretasikan oleh guru dan peserta didik, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pembelajaran sejarah dalam membangun kesadaran ketatanegaraan yang kritis.

DAFTAR PUSTAKA

Apple, M. W. (2019). Ideology and Curriculum (4th ed.). Routledge.

https://doi.org/10.4324/9780429400384

Asshiddiqie, Jimly. (2020). Konstitusi & konstitutionalisme Indonesia (2nd ed.). Sinar Grafika.

Capaian Pembelajaran Pada Kurikulum Merdeka 2024, Pub. L. 032/H/KR/2024 (2024). https://lmsspada.kemdiktisaintek.go.id/pluginfile.php/756064/mod_resource/content/2/Capaian%20Pembelajaran%20Pada%20Kurikulum%20Merdeka%202024.pdf

Freire, Paulo., Ramos, M. Bergman., Macedo, D. P. ., & Shor, Ira. (2018). Pedagogy of the Oppressed. Bloomsbury Academic. https://fsi-ebcao.princeton.edu/sites/g/files/toruqf1411/files/media/freire.pdf

Hasan, A. (2017). Pendidikan Sejarah untuk Kehidupan Berbangsa dan Masa Depan Bangsa. Seminar Nasional Dan Kongres Asosiasi Pendidik Dan Peneliti Sejarah (APPS).

Hasan, S. H. (2012). Pendidikan Sejarah Untuk Memperkuat Pendidikan Karakter. Paramita: Historical Studies Journal, 22(1). https://doi.org/10.15294/paramita.v22i1.1875

Krippendorff, K. (2019). Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. In T. Accomazzo (Ed.), Content Analysis: An Introduction to Its Methodology (4th ed.). SAGE Publications, Inc. https://doi.org/10.4135/9781071878781

Levstik, L. S., & Barton, K. C. (2023). Doing History: Investigating with Children in Elementary and Middle Schools (6th ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003179658

Mahardika, M. D. G. (2020). KEPENTINGAN REZIM DALAM BUKU TEKS SEJARAH DI SEKOLAH. ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah, 16(1), 1–7. https://doi.org/10.21831/istoria.v16i1.33401

Neuendorf, K. A. (2019). The Content Analysis Guidebook. In K. Omer (Ed.), The Content Analysis Guidebook (2nd ed.). SAGE Publications, Inc. https://doi.org/10.4135/9781071802878

Nindiati, D. S., & Purwanta, H. (2023). Comparative Analysis of G30S PKI Materials in High School History Textbooks. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 10(9), 9. https://doi.org/10.18415/ijmmu.v10i9.5014

Pingel, Falk. (2010). UNESCO Guidebook on Textbook Research and Textbook Revision (2nd ed.). UNESCO ; Georg Eckert Institut for International Textbook Research. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000117188/PDF/117188eng.pdf.multi

Pratiwi, E., & Sayono, J. (2024). Analisis Pendidikan Karakter Pada Buku Teks Sejarah Kelas XI Kurikulum Merdeka. Jayapangus Press Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan, 7(1), 191–03. https://doi.org/10.37329/cetta.v7i1.3139

Safitry, M., Utami, I. W. P., & Ilyas, Z. (2021). Sejarah untuk SMA/SMK Kelas XI (N. Janti, Ed.; 1st ed.). Pusat Perbukuan, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. https://buku.kemdikbud.go.id

Safitry, M., Utami, I. W. P., & Ratmanto, A. (2022). Sejarah untuk SMA/MA Kelas XII (M. R. Abdi, Ed.; 3rd ed.). Pusat Perbukuan, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. https://buku.kemdikbud.go.id

Saputra, D., Kumala, F., & Yoga Firmansyah, dan. (2021). ALASAN DILAKUKANNYA 4 KALI AMANDEMEN UUD 1945: TUJUAN

DAN SEJARAH PERKEMBANGAN. Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara, 1(1), 1. https://e-journal.metrouniv.ac.id/siyasah/article/view/3482/2277

Seixas, P., & Morton, T. (2013). The Big six of Historical Thinking Concepts (L. Jenkins, Ed.). Nelson Education.

Susanto, H., Fatmawati, S., & Fathurrahman, F. (2022). Analisis Pola Narasi Sejarah dalam Buku Teks Lintas Kurikulum di Indonesia. Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah Dan Pendidikan, 6(2), 228–243. https://doi.org/10.29408/fhs.v6i2.6632

Susanto, H., & Purwanta, H. (2022). Analisis Pola Narasi Reflektif Buku Teks Sejarah SMA Untuk Pencapaian Empati Sejarah. Yupa: Historical Studies Journal, 6(1), 45–62. https://doi.org/10.30872/yupa.v6i1.1066